



**PERATURAN  
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

**NOMOR 2 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**MEKANISME PEMILIHAN DAN KRITERIA ANGGOTA UNSUR  
PENGARAH PENANGGULANGAN BENCANA DARI MASYARAKAT  
PROFESIONAL PADA BADAN NASIONAL  
PENANGGULANGAN BENCANA**

**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA  
(BNPB)**

**1. PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA  
NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG MEKANISME PEMILIHAN DAN  
KRITERIA ANGGOTA UNSUR PENGARAH PENANGGULANGAN  
BENCANA DARI MASYARAKAT PROFESIONAL PADA BADAN NASIONAL  
PENANGGULANGAN BENCANA**

**2. LAMPIRAN PERATURAN**

**DAFTAR ISI**

BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang .....	1
	1.2 Tujuan.....	1
	1.3 Dasar Hukum .....	1
	1.4 Pengertian .....	1
	1.5 Sistematika.....	2
BAB II	UNSUR PENGARAH PENANGGULANGAN BENCANA	
	2.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi .....	2
	2.2 Keanggotaan .....	2
BAB III	MEKANISME PEMILIHAN DAN KRITERIA ANGGOTA UNSUR PENGARAH PENANGGULANGAN BENCANA	
	3.1 Mekanisme Pemilihan.....	3
	3.2 Kriteria .....	3
BAB IV	PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN	
	4.1 Pengangkatan .....	4
	4.2 Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu .....	4
BAB IV	PENUTUP .....	5



**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

**PERATURAN  
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

**NOMOR 2 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**MEKANISME PEMILIHAN DAN KRITERIA ANGGOTA UNSUR PENGARAH  
PENANGGULANGAN BENCANA DARI MASYARAKAT PROFESIONAL  
PADA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 58 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, dipandang perlu menetapkan peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Mekanisme Pemilihan dan Kriteria Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang berasal dari masyarakat profesional;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG MEKANISME PEMILIHAN DAN KRITERIA ANGGOTA UNSUR PENGARAH PENANGGULANGAN BENCANA DARI MASYARAKAT PROFESIONAL PADA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA.**

**Pasal 1**

Mekanisme pemilihan dan kriteria anggota unsur pengarah digunakan sebagai acuan/arahan dalam melakukan pemilihan untuk mendapatkan anggota unsur pengarah penanggulangan bencana dari masyarakat profesional sesuai dengan yang amanat peraturan perundangan.

Pasal 2 ...

Pasal 2

Mekanisme pemilihan dan kriteria sebagaimana dimaksud diktum Pertama adalah sebagaimana dalam Lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.


Pasal 3

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Juli 2008


KEPALA BADAN NASIONAL  
PENANGGULANGAN BENCANA,



SYAMSUL MAARIF 

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Oktober 2014

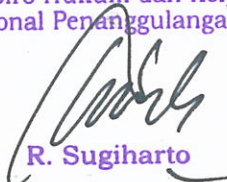
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,



AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1550

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Kerjasama  
Badan Nasional Penanggulangan Bencana



R. Sugiharto

LAMPIRAN  
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL  
PENANGGULANGAN BENCANA  
NOMOR 2 TAHUN 2008  
TENTANG MEKANISME PEMILIHAN DAN  
KRITERIA ANGGOTA UNSUR PENGARAH  
PENANGGULANGAN BENCANA DARI  
MASYARAKAT PROFESIONAL PADA BADAN  
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

**MEKANISME PEMILIHAN DAN KRITERIA ANGGOTA UNSUR PENGARAH  
PENANGGULANGAN BENCANA DARI MASYARAKAT PROFESIONAL PADA  
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

**BAB I  
UMUM**

**1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana memberikan mandat kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana tersebut, dibentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat Pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat Daerah.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, telah dibentuk BNPB yang terdiri atas Kepala, Unsur Pengarah penanggulangan bencana dan Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 58 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, perlu menetapkan mekanisme pemilihan dan kriteria anggota unsur pengarah penanggulangan bencana dari masyarakat profesional.

**1.2 Tujuan**

Mekanisme ini disusun untuk memberikan acuan/panduan dalam melakukan pemilihan guna memperoleh anggota unsur pengarah penanggulangan bencana dari masyarakat profesional pada BNPB sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

**1.3 Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- b. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

**1.4 Pengertian**

- a. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, selanjutnya disebut BNPB adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen setingkat menteri, berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden, yang dibentuk dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- b. Unsur pengarah penanggulangan bencana adalah bagian/unsur BNPB yang bertugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BNPB dalam penanggulangan bencana.
- c. Masyarakat Profesional adalah lembaga/ organisasi yang beranggotakan para pakar/profesional dan/atau tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan, kemampuan, keahlian dan pengalaman di bidang penanggulangan bencana.

- d. Lembaga independen adalah lembaga/organisasi yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pemilihan calon anggota unsur pengarah penanggulangan bencana dan tidak memiliki kepentingan atau keberpihakan terhadap pihak-pihak tertentu dalam pemilihan calon anggota unsur pengarah penanggulangan bencana

### 1.5 Sistematika

Mekanisme ini berisi materi tentang tata cara/prosedur dalam pemilihan anggota unsur pengarah penanggulangan bencana dari masyarakat profesional, sebagai berikut :

- I. UMUM
- II. UNSUR PENGARAH PENANGGULANGAN BENCANA
- III. MEKANISME PEMILIHAN DAN KRITERIA ANGGOTA PENANGGULANGAN BENCANA
- IV. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA UNSUR PENGARAH PENANGGULANGAN BENCANA
- V. PENUTUP

## **BAB II UNSUR PENGARAH PENANGGULANGAN BENCANA**

Unsur pengarah penanggulangan bencana merupakan bagian dari BNPB yang bersama-sama unsur pelaksana melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

### 2.1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

- a. Unsur pengarah penanggulangan bencana berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BNPB.
- b. Unsur pengarah penanggulangan bencana mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BNPB dalam penanggulangan bencana.
- c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut huruf b, unsur pengarah penanggulangan bencana menyelenggarakan fungsi :
  - 1) perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana nasional;
  - 2) pemantauan; dan
  - 3) evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

### 2.2 Keanggotaan

- a. Unsur pengarah penanggulangan bencana terdiri dari Ketua dan Anggota.
- b. Ketua unsur pengarah penanggulangan bencana dijabat oleh Kepala BNPB.
- c. Keanggotaan unsur pengarah penanggulangan bencana berasal dari lembaga pemerintah dan masyarakat profesional.

- d. Anggota unsur pengarah penanggulangan bencana berjumlah 19 (sembilan belas) anggota, terdiri dari :
  - 1) 10 (sepuluh) anggota berasal dari pejabat eselon I lembaga pemerintah atau yang setingkat yang diusulkan oleh Pimpinan Lembaga Pemerintah, yang mewakili :
    - a) Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
    - b) Departemen Dalam Negeri
    - c) Departemen Sosial
    - d) Departemen Pekerjaan Umum
    - e) Departemen Kesehatan
    - f) Departemen Keuangan
    - g) Departemen Perhubungan
    - h) Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
    - i) Kepolisian Negara Republik Indonesia
    - j) Tentara Nasional Indonesia
  - 2) 9 (sembilan) anggota dari masyarakat profesional yang berasal dari pakar/profesional dan/atau tokoh masyarakat

### **BAB III**

#### **MEKANISME PEMILIHAN DAN KRITERIA ANGGOTA UNSUR PENGARAH PENANGGULANGAN BENCANA**

##### **3.1 Mekanisme Pemilihan**

Pemilihan anggota unsur pengarah penanggulangan bencana dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Unsur pengarah penanggulangan bencana dari lembaga pemerintah
  - 1) Pemilihan anggota unsur pengarah penanggulangan bencana dari lembaga pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Unsur pengarah penanggulangan bencana dari masyarakat profesional;
  - 1) Pemilihan calon anggota unsur pengarah penanggulangan bencana dari masyarakat profesional dilakukan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat dengan diumumkan melalui media.
  - 2) Pemilihan calon anggota unsur pengarah penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada butir 1) dilaksanakan oleh lembaga independen yang mempunyai tugas menerima pendaftaran, melaksanakan penjangkaran, seleksi, dan menyampaikan hasil pemilihan kepada Kepala BNPB.
  - 3) Lembaga independen sebagaimana dimaksud butir 2) ditunjuk/ ditetapkan oleh Kepala BNPB.
  - 4) Kepala BNPB mengusulkan 18 (delapan belas) calon anggota unsur pengarah penanggulangan bencana dan masyarakat profesional hasil pemilihan kepada Presiden atau 2 (dua) kali lipat secara proporsional dari jumlah anggota Unsur pengarah penanggulangan bencana dari masyarakat profesional untuk dilakukan uji kepatutan dan uji kelayakan oleh DPR-RI.
  - 5) Calon anggota unsur pengarah penanggulangan bencana yang dinyatakan lulus uji kepatutan dan uji kelayakan disampaikan oleh DPR-RI kepada Presiden untuk ditetapkan sebagai anggota unsur pengarah penanggulangan bencana secara definitif.

- 6) BNPB mengumumkan kepada masyarakat luas hasil uji kepatutan dan uji kelayakan melalui media.
- 3.2 Kriteria

Calon anggota unsur pengarah penanggulangan bencana dari masyarakat profesional harus memenuhi kriteria/persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Sehat jasmani dan rohani.
- c. Berkelakuan baik
- d. Usia serendah-rendahnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun.
- e. Memiliki wawasan kebangsaan.
- f. Memiliki pengetahuan akademis dan pengalaman dalam penanggulangan bencana.
- g. Berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana (S1).
- h. Memiliki integritas tinggi.
- i. Non-partisan.

#### **BAB IV**

#### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA UNSUR PENGARAH PENANGGULANGAN BENCANA**

##### 4.1 Pengangkatan

- a. Pengangkatan anggota unsur pengarah penanggulangan bencana ditetapkan oleh Presiden.
- b. Anggota unsur pengarah penanggulangan bencana diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun.
- c. Tata cara/prosedur pengangkatan anggota unsur pengarah penanggulangan bencana dari lembaga pemerintah dan masyarakat profesional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### 4.2. Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu

- a. Pemberhentian anggota unsur pengarah penanggulangan bencana dari masyarakat profesional dilakukan setelah berkonsultasi dan mendapatkan persetujuan dari DPR-RI
- b. Pergantian antar waktu anggota unsur pengarah penanggulangan bencana dilakukan karena alasan sebagai berikut :
  - 1) meninggal dunia.
  - 2) mengundurkan diri sebagai anggota unsur pengarah penanggulangan bencana atas kemauan sendiri.
  - 3) tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota unsur pengarah penanggulangan bencana.
- c. Calon anggota pengganti berasal dari calon anggota yang telah mengikuti uji kepatutan dan uji kelayakan dan mewakili unsur/organisasi dari anggota yang digantikan.



**BAB V**  
**PENUTUP**

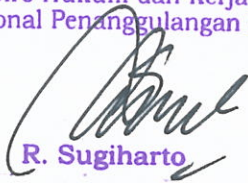
Mekanisme ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**KEPALA BADAN NASIONAL  
PENANGGULANGAN BENCANA,**



**SYAMSUL MAARIF**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Kerjasama  
Badan Nasional Penanggulangan Bencana



**R. Sugiharto**